

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LABDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Luayyi (2010) menyebutkan bahwa: Di dalam teori keagenan pada dasarnya membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan, di sini manajer mengembangkan tanggungjawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, jika dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah yang sering kali mendasari mengapa manajer mau melakukan manajemen laba (yang bersifat negatif yang semata-mata hanya ingin melindungi dirinya dan merugikan banyak pihak.

Lebih lanjut Anthony dan Govindarajan (2009) mengatakan bahwa, teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada orang lain, sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan sendiri.

Teori agensi ini muncul ketika ada sebuah hubungan kerja antara satu orang atau lebih (prinsipal) memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk menerima wewenang dan menjalankan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaannya. Manajer (agen) mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberi informasi kepada pemilik (prinsipal), dikarenakan seorang manajer (agen) lebih mengetahui keadaan perusahaan dibanding pemilik perusahaan (prinsipal). Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Manajer berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaikbaiknya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup signifikan, kemudian agen melaporkan kepada pemilik perusahaan (prinsipal) tentang keadaan perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Karena memiliki tanggungjawab yang berat, manajer menuntut pemilik perusahaan (prinsipal) untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan manajer. Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi karena terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan antara prinsipal dan agen.

Lebih lanjut Yulfaida (2012) mengatakan bahwa manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham, sebagian dikarenakan oleh pemilihan yang kurang baik atau adanya moral hazard, selain itu juga dapat memicu adanya asimetri informasi dan manajemen laba. Sedangkan menurut Samuelson (2011) asimetri informasi pada teori agensi terjadi karena faktor-faktor berikut:

#### 1. *Adverse selection*

*Adverse selection* mengungkapkan bahwa adanya ketidak seimbangan informasi yang dimiliki antara kedua belah pihak yaitu prinsipal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pemegang saham, debitur, pemilik perusahaan) dan agen (manajemen perusahaan).

#### 2. *Moral hazard*

*Moral hazard* menjelaskan tentang suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan pihak agen (manajemen perusahaan) yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut terjadi akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh para pemegang saham maupun kreditur sehingga memungkinkan agen untuk melakukan tindakantindakan yang tidak sesuai dengan norma.

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* apat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal.

Terdapat beberapa cara untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajer (agen), salah satunya adanya komisaris independen dalam di dalam perusahaan. Adanya komisaris

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen dalam perusahaan dapat mengurangi konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer, karena salah satu tugas komisaris independen adalah mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar berjalan dengan baik.

### 2.2 Effective Tax Rate

*Effective tax rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Aunalal, 2011). Sedangkan menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Xing dan Shunjun (2007) dalam Wibowo (2012), mendefinisikan *effective tax rate* (ETR) sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan.

Aunalal (2011) memberikan beberapa alasan mendasar terkait dengan penetapan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Alasan pertama adalah adanya pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. Pengaruh perubahan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik terkadang dapat menyebabkan adanya intervensi tergantung dengan bagaimana pihak-pihak yang berkuasa dan yang berkepentingan. Tidak transparasinya proses penetapan tarif pajak yang dilakukan pemerintah menyebabkan adanya kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para *investor*. Dengan laporan pajak maka para *investor* dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan *investor* yang cenderung memilih berada pada jalur aman dalam setiap investasinya.

Aunalal (2011) mengklasifikasikan *effective tax rate* (ETR) dalam empat jenis yaitu:

- a. *Average Effective Corporate Tax Rate*: biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).
- b. *Average Affective Total Tax Rate*: besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.
- c. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*: besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak *Marginal Effective Corporate Tax Rate*: pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Marginal Effective Total Tax Wedge*: penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan. *Marginal Effective Total Tax Rate*: total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax-exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

Pada dasarnya *marginal effective rate* lebih spesifik digunakan untuk menyelidiki dampak yang terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan, sedangkan *average effective rate* menunjukkan beban pajak secara keseluruhan pada perusahaan. Keberadaan *effective tax rate* menurut Grant dan Roman (2007) menjelaskan bahwa *effective tax rate* (ETR) sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

## 2.3 Konsep *Corporate Governance*

### 2.3.1 Pengertian *Corporate Governance*

Sebagai sebuah konsep, *corporate governance* ternyata tidak memiliki suatu definisi tunggal. Banyak yang menafsirkan definisi *corporate governance* kedalam pemahaman masing-masing namun masih dalam batasan yang cukup wajar. *Corporate governance* menurut *Indonesian Institut for Corporate Governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

*Corporate governance* dapat berarti sebagai tata kelola yang baik dimana terdapat suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardana, 2009). Tata kelola perusahaan yang baik dapat disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, cara pencapaiannya dan penilaian kinerja perusahaan tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *corporate governance* merupakan serangkaian hubungan antara perusahaan dan para *stakeholder*-nya (pemegang saham dan pihak lain yang terlibat dalam suatu perusahaan). Di dalam *corporate governance* terdapat suatu struktur perangkat yang mencapai tujuan atas pengawasan kinerja.

Komite Cadbury mengeluarkan suatu definisi dari *corporate governance*. Definisi tersebut adalah suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *stakeholder* khususnya.

Penerapan *corporate governance* sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerapan praktik *corporate governance* dalam Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa *corporate governance* adalah:

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya serta berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Organ yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi, sedangkan *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung. *Corporate governance* didefinisikan sebagai struktur karena *corporate governance* berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Sementara sebagai sebuah proses, *corporate governance* memastikan transparansi serta proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para *Stakeholder* lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Suatu sistem pengecekan, perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

### 2.3.2 Prinsip – prinsip *Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola perusahaan secara baik dan benar sebagaimana mestinya dengan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu *corporate governance* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009 dalam Waryanto, 2010). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip utama dari *Corporate Governance*.

*Organization for Economic Cooperation and Development* dalam (Surya dan Yustiavandana, 2007) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

#### 1. *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan harus memberikan kedudukan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Dalam hal ini, terutama kepada pemegang saham minoritas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Pengungkapan informasi mengenai perusahaan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan harus menunjukkan adanya transparansi informasi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para *stakeholder*.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan para *stakeholders*.

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang sehingga perusahaan dapat memperoleh nama baik.

5. *Independency* (Independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

**2.3.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

Penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2006*), yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia..
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen. Tujuan dan manfaat penerapan *good corporate governance* pada perusahaan.

Menurut Surya dan Yustiavanda (2007) adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

#### 2.3.4 Karakteristik *Corporate Governance*

Karakteristik *corporate governance* terbagi dalam dua bagian yaitu *internal governance* dan *external governance* seperti yang dijelaskan Andayani (2010). *Internal governance* meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan *external*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*governance* terdiri dari *institutional ownership*, pasar dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*) Andayani (2010).

Karakteristik *corporate governance* berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat wajib memiliki:

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.
2. Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan diketuai oleh seorang komisaris independen.
3. Sekretaris perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini karakteristik *corporate governance* yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit dan *investor* institusional. Ketiga karakteristik *corporate governance* merupakan perpaduan antara *internal governance* dan *external governance*.

#### 2.3.4.1 Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap *investor*. Untuk mendorong implementasi *corporate governance*, dibentuk sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia (Surya dan Yustiavandana, 2007). Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah komisaris independen dan komite audit.

Surya dan Yustiavandana (2007) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat terjadinya keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder*-nya. Keberadaan komisaris independen berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.I5 adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi (Surya dan Yustiavandana, 2007):

- a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).
- b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
- c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*).

- d. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan melakukan perubahan jika diperlukan.
- e. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan jelas.

#### 2.3.4.2 Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep- 29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP- 103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk: (i) meningkatkan kualitas laporan keuangan; (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit; serta (iv) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit akan dituangkan dalam *Charter* Komite Audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu *financial reporting*, *corporate governance*, dan *risk and control management*.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan serta menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2007). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab terhadap dewan komisaris Surya dan Yustiavandana, (2007).

#### 2.3.4.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG sesuai dengan aturan. Namundemikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewankomisaris termasuk komisaris utama adalah setara.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97, dijelaskan bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPT menegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleksitas perusahaan dengantetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dankekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksidan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi sertakaryawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalamkategori terafiliasi (KNKG, 2006).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Variabel	Peneliti	Analisis Statistik	Hasil
1	Komisaris Independen (x1) Komite Audit (x2) Investor Institusional (x3) <i>Efective Tax Rate</i> (y)	Hoshemi Rodian Hanum (2013)	Analisis Linear Berganda	Komisaris Independen, Komite Audit, Investor Institusional,memiliki pengaruh terhadap <i>Efective Tax Rate</i>
2	Komisaris	Hanum dan		Komisaris Independen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Independen (x1)	Zulaika		Komite Audit dan Investor
Komite Audit (x2)	(2013)		Institusional tidak
Investor Institusional (x3)			memiliki pengaruh
<i>Effective Tax Rate</i> (y)			terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Komisaris	Marita,	Multiple	Komisaris Independen
Independen (x1)	Puspa,	Regresision	dan Komite Audit tidak
Komite Audit (x2)	Rahmawati	Model	memiliki pengaruh
Investor Institusional (x3)	(2014)		terhadap <i>Effective Tax</i>
<i>Effective Tax Rate</i> (y)			<i>Rate</i> , sedangkan
			Investor Institusional
			memiliki pengaruh
			terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Dewan Komisaris (x1)	Wulandari	Model	Dewan Komisaris
Komisaris Independen (x2)	dan Septian	Regresi	Komisaris Independen,
Investor Institusional (x3)	(2015)	Data Panel	Investor Institusional, dan
Komite Audit (x4)			Komite Audit, memiliki
Kepemilikan Saham			pengaruh terhadap
Manajerial (x5)			<i>Effective Tax Rate</i> ,
<i>Effective Tax Rate</i> (y)			Sedangkan Kepemilikan
			Saham Manajerial tidak
			memiliki pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
5	Komisaris Independen (x1) Investor Institusional (x2) Komite Audit (x3) Kepemilikan Saham Manajerial (x4) <i>Effective Tax Rate</i> (y)	Rahati Wulansari (2015)	Multiple Regression Analisis	Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Saham Manajerial memiliki pengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> , Sedangkan Investor tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
6	Ukuran Perusahaan (x1) <i>Leverage</i> (x2) <i>Profitabilitas</i> (x3) <i>Capital Inetensity Ratio</i> (x4) Komisaris Independen (x5) <i>Effective Tax Rate</i> (y)	Ardiansyah (2014)	Deskriptif Data	Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> , sedangkan <i>Leverage, Profitabilitas</i> dan <i>Capital Inetensity Ratio</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>

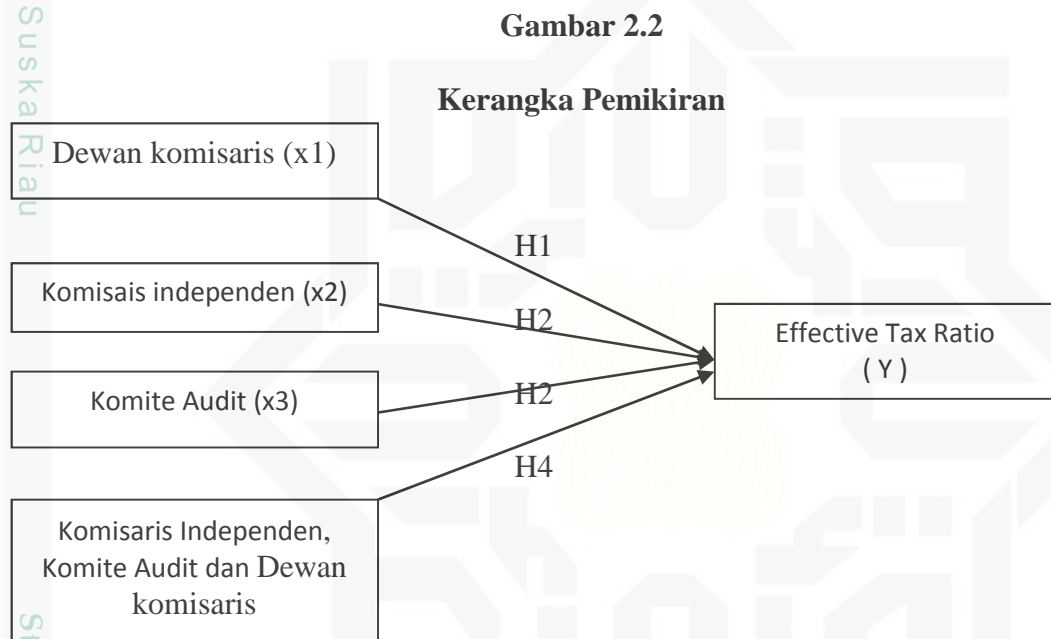
Sumber : Olahan Penulis 2018



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis akan menjelaskan bagaimana dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit dapat mempengaruhi *effectivetax rate* (ETR). Kerangka pemikiran teoritis yang kemudian dikembangkan pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Sumber : Olahan Penulis 2018

## 2.6 Pengembangan Hipotesis

### 2.6.1 Pengaruh dewan komisaris terhadap *Effective Tax Rate*

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan ataupun manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Dengan demikian, dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian (experience and expertise) yang dimiliki oleh Dewan Komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, et. al., 2009). Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka monitoring akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Mengingat fungsi dewan komisaris, maka penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*

## 2.6.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijelaskan oleh Surya dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yustiavandana, (2008). Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris dari manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Komisaris independen merupakan bagaian yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Bonazzi dan Islam (2007) menyatakan bahwa bukti empiris masa lalu telah menyepakati peran pengawasan yang baik dilakukan oleh dewan luar perusahaan dan direktur independen terhadap kinerja manajerial dan perusahaan secara keseluruhan dimana para dewan luar dan direktur perusahaan mengawasi perusahaan agar beroperasi sesuai dengan jalurnya dan tidak bertentangan dengan hukum.

Minnick dan Noga (2010) melihat aspek dari sisi positif yang menyangkut pada nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang signifikan dari *bottom line performance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan.

Komisaris independen bersama dewan komisaris yang lain bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder*. Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan, sehingga mengarah ke hipotesis pertama sebagai berikut:

H2 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai ETR (*Effective Tax Rate*)

#### 2.6.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Komite audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan Said *et al.* (2009). Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003). Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai ETR (*Effective TaxRate*).

#### **2.6.4 Pengaruh *Corporate Governance* (Komisaris Independen, Komite Audit, dan dewan komisaris Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR))**

Definisi simultan adalah sesuatu yang terjadi berbarengan atau pada waktu yang bersamaan. Jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya istilah ini sangat sering kita gunakan akan tetapi dengan bahasa sehari-hari seperti sewaktu, bertepatan, serentak, serempak, bersama-sama, dan lain sebagainya. Simultan dalam ekonomi adalah berbagai variabel ekonomi yang mempunyai pengaruh atau korelasi yang positif dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa variabel ekonomi lainnya. Contohnya pendapatan seseorang mempunyai pengaruh simultan terhadap tingkat konsumsi dan tingkat produksi. Contohnya jika pendapatan perkapita penduduk di suatu negara naik maka akan terjadi peningkatan konsumsi dan dampaknya produksi yang dilakukan oleh produsen juga akan meningkat untuk mengimbangi jumlah konsumsi barang yang naik, begitu juga sebaliknya.

H4 : *Corporate Governance* ( Komisaris Independen, Komite Audit, dan dewan komisaris berpengaruh Terhadap *Effetife Tax Rate* ( ETR ).

## 2.7 Pajak Dalam Islam

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya. [1] Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” [HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Definisi Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (Al-Usyr) [2] atau (Al-Maks), atau bisa juga disebut ضَرِيَّة (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” [3]. Atau suatu ketika bisa disebut (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.[4]

Sedangkan para pemungutnya disebut (Shahibul Maks) atau (Al-Asysyar).

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”[5].